

BAB II

GENDER MAINSTREAMING DALAM KEBIJAKAN WOMENOMICS

2.1 Sejarah *Womenomics* dan Implementasinya di Jepang

Womenomics merupakan bagian dari reformasi struktural *Abenomics*. Sejak terpilihnya Abe menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang periode yang kedua pada tahun 2012, ia melakukan banyak perubahan dalam sistem pemerintahannya, salah satunya adalah kebijakan bidang perekonomian. Demi mengatasi masalah perlambatan pertumbuhan ekonomi di Jepang, Abe berambisi untuk melakukan perubahan kebijakan yang kemudian dikenal dengan *Abenomics*. Di dalam *Abenomics* terdapat tiga arah (*three arrows*) yang hendak dicapai, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan reformasi struktural. Kunci dari ketiga komponen tersebut adalah reformasi struktural yang akan berfokus pada *womenomics* (Chanlett-Avery & Nelson, 2014, hlm. 3).

Awalnya, “*womenomics*” diciptakan oleh seorang analis senior Goldman Sachs yaitu Kathy Matsui. Dalam laporannya, Matsui menyatakan bahwa Jepang dapat meningkatkan pertumbuhannya sebanyak 13% bila merekrut lebih banyak perempuan dalam sektor publik. Lebih lanjut, Matsui berpendapat bahwa krisis demografi yang sedang dihadapi oleh Jepang dapat diatasi dengan menambah tenaga kerja perempuan (K. Matsui dkk., 1999). Ide ini akhirnya menginspirasi Abe untuk mengadopsi *womenomics* dalam kebijakan yang ia rancang. Isu gender yang kerap kali terjadi dalam peran mereka sebagai tenaga kerja menjadi fokus

pengembangan pemerintah. Menurut Abe, perempuan yang selama ini dianggap sebagai *'underutilized resources'* atau sumber daya manusia yang tidak dimanfaatkan dengan baik, memiliki potensi yang besar dengan berkontribusi terhadap proses pertumbuhan ekonomi Jepang (Abe, 2013). Dengan mengadopsi *womenomics* kedalam kebijakan domestik Jepang, Abe berharap semakin banyak perempuan yang mengambil peran dalam segala sektor ketenagakerjaan. Walaupun bukan sebuah konsep yang baru, namun kebijakan *womenomics* merupakan komitmen pemerintah Jepang dibawah pimpinan Abe untuk membawa kemajuan yang baru bagi Jepang (Abe, 2014).

Pada 22 Januari 2014, Shinzo Abe memberikan pidatonya dalam pertemuan rutin World Economic Forum yang berisikan tentang fokus utama dari Abenomics berfokus pada program pemberdayaan perempuan. Dalam pidatonya, Shinzo Abe menjanjikan suatu keadaan dimana *"all women can shine"*. Setelah pidato tersebut teretuslah istilah *Womenomics* yang merupakan gabungan kata dari *women* dan *economics* sejalan dengan rancangan besar yang memayunginya yaitu *Abenomics* (Chanlett-Avery & Nelson, 2014). Di dalam praktiknya, Abe memformulasikan 6 program sebagai tujuan pencapaian *womenomics* sebagai kebijakan domestik dalam tranformasi masyarakat menuju kesetaraan gender. Program-program tersebut dituangkan dalam *National Action Plan Japan 2013* dan diperkuat lagi melalui *Act concerning Promotion of Women's Career Activities (PWCA)*³ dan telah disahkan oleh *National Diet* pada 28 Agustus 2015 dengan pemberlakuan sanksi terhitung

³*Act Concerning Promotion of Women's Career Activities (PWCA)* adalah Undang-Undang tentang pengembangan kesempatan perempuan untuk dapat berkarir

mulai 1 April 2016 (Saputra, 2016). Program-program tersebut terdiri atas: peningkatan persentase partisipasi perempuan dalam ketenagakerjaan; peranan perempuan pada posisi kepemimpinan mencapai 30% di tahun 2020; peningkatan persentase perempuan (ibu rumah tangga) kembali ke dunia kerja; penambahan pembangunan fasilitas *childcare* dan *after school club*; meningkatkan persentase ayah atau laki-laki yang mengambil cuti untuk mengasuh anak; pengurangan perusahaan dengan jam kerja yang lebih dari 60 jam per minggu.

Pertama, yaitu peningkatan persentase perempuan dalam ketenagakerjaan. 50% dari populasi Jepang adalah perempuan dan mayoritas berusia produktif. Oleh karena itu dibawah kepemimpinan Shinzo Abe, proses rekrutmen pekerja harus berwawasan gender. Target dari program ini diatur sesuai tahapan usia, yaitu kelompok pekerja usia 25 hingga 44 tahun meningkat menjadi 77% pada tahun 2020; kelompok pekerja usia 20 hingga 34 tahun meningkat menjadi 79% pada tahun 2020; kelompok pekerja usia 20 hingga 64 tahun menjadi 80% pada tahun 2020; dan tenaga kerja perempuan kelompok usia 60 hingga 64 tahun meningkat menjadi 67% pada tahun 2020.

Kedua, yaitu peranan perempuan di posisi kepemimpinan mencapai persentase 30% di tahun 2020. Program ini menargetkan perempuan dapat berada di posisi-posisi pemimpin seperti menteri, direktur, wakil direktur, manajer, gubernur, ketua departemen, guru besar dan sebagainya. Demi tercapainya target tersebut maka perusahaan, partai dan pemerintah harus merubah iklim kerja dengan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bersaing secara sehat dengan laki-

laki tanpa adanya *stereotyping* gender. Terhitung sejak Maret 2015 pemerintah Jepang mewajibkan perusahaan, badan pemerintahan, dan bidang pekerjaan lainnya untuk menaikkan angka kehadiran perempuan di posisi manajemen. Selain itu ditugaskan untuk membuat *voluntary action plan* dan laporan data terkait penerimaan pegawai perempuan.

Ketiga adalah peningkatan persentase perempuan (ibu rumah tangga) untuk kembali ke dunia kerja. Perempuan yang pernah bekerja namun kemudian keluar dari pekerjaannya mayoritas adalah ibu rumah tangga. Kebanyakan dari mereka yang berhenti bekerja setelah berkeluarga masih berada pada usia produktif yaitu 20 hingga 35 tahun. Dinilai pada usia tersebut adalah kesempatan emas bagi perempuan untuk berkarir. Oleh sebab itu, pemerintah Jepang berupaya mengembalikan mereka untuk melanjutkan karirnya ataupun mencari pekerjaan baru.

Program yang **keempat** berhubungan dengan poin ketiga. Adapun program pada poin yang keempat ini adalah percepatan dan penambahan fasilitas *childcare* dan *after school club*. Program tersebut adalah bagian dari pengembangan infrastruktur untuk mendukung kemajuan perempuan dalam dunia kerjanya. Dengan tersedianya fasilitas tersebut, perempuan atau ibu muda yang telah memiliki anak dapat semakin yakin untuk kembali bekerja karena adanya penjaminan anak yang terjamin. Disamping itu, program ini memberikan peluang perempuan untuk memiliki karir yang tinggi.

Selanjutnya, program **kelima** adalah meningkatkan persentasi ayah atau laki-laki yang mengambil cuti untuk dapat mengasuh anaknya. Diharapkan melalui program ini dapat menghapus stigma yang melekat dalam masyarakat Jepang bahwa beban mengurus anak serta urusan rumah tangga adalah tanggung jawab istri atau perempuan. Dengan kata lain, dengan adanya kebijakan *womenomics* dapat mentransformasi budaya menjadi masyarakat yang lebih modern.

Program yang terakhir, **keenam** adalah pengurangan perusahaan yang memiliki jam kerja lebih dari 60 jam per minggu. Penerapan jam kerja selama 60 jam dalam seminggu pada sebagian besar perusahaan dan unit kerja lainnya dinilai tidak efektif untuk menjamin keseimbangan hidup pribadi dan pekerjaan. Oleh karena itu, *womenomics* menargetkan pengurangan perusahaan yang masih menerapkan jam kerja lebih dari 60 jam perminggu hanya mencapai 5% saja pada tahun 2020.

Terciptanya program-program tersebut yang disusun dalam *womenomics* menunjukkan keseriusan pemerintah Jepang untuk mengubah pemahaman masyarakat terhadap gender. Bukan hanya mengarah pada pertumbuhan ekonomi domestik, tapi juga sebagai bentuk responsif gender dengan menuntut kesetaraan kesempatan dan kebebasan semua individu (Saputra, 2016). Melalui *World Assembly for Women* (WAW) di Tokyo, Shinzo Abe menegaskan bahwa *womenomics* tidak hanya sebagai upaya untuk menciptakan keadaan ‘*women can shine*’, namun juga upaya kerjasama agar laki-laki dan perempuan dapat bersinar bersama-sama (Official Website Perdana Menteri Jepang, 2014). Dengan

tercapainya target-target tersebut maka akan menghasilkan titik solusi atas permasalahan yang terjadi. Kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan menunjukkan prinsip *good governance* yang terkandung dalam Konstitusi 1947. Secara tidak langsung, implementasi *womenomics* adalah perwujudan nyata Konstitusi 1947 pasal 14 tentang hak asasi dan kewajiban masyarakat, yang berbunyi:

“all of the people are equal under the law and there shall be no discrimination in political, economic or social relations because of race, sex, social status, or family origin.” (Liddle & Nakajima, 2000).

Dalam kajian kembali mengenai implementasi program-program yang telah disebutkan diatas, nyatanya masih banyak target yang masih belum dapat tercapai pada tahun 2020. Misalnya pada program yang kedua seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu tentang keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan, namun berdasarkan data lapangan menunjukkan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan mengalami kenaikan hanya sekitar 12% perempuan dari target yang ingin dicapai yaitu sebanyak 30%. Sebagai contohnya, dari 20 orang anggota kabinet LDP, hanya ada 3 orang perempuan yang terlibat didalamnya (Rich & Ueno, 2020). Kemudian juga program pada poin keempat diatas tentang penambahan fasilitas *childcare* belum menunjukkan hasil yang baik, sebab pada tahun 2020 masih banyak wanita yang berjuang untuk mendapatkan fasilitas *childcare* yang memadai dan sekitar 12.500 anak masuk kedalam *waiting list*. Disisi lain hambatan tersebut disebabkan oleh kurangnya minat tenaga kerja perempuan

menjadi pekerja *childcare* karena upah yang cenderung mengalami penurunan. Kegagalan implementasi yang berikutnya adalah program keenam yang berkaitan dengan pengurangan perusahaan dengan jam kerja yang lebih dari 60 jam dalam seminggu, pada kenyataannya masih ada perusahaan yang bekerja dengan jam kerja 100 jam per minggunya. Contoh masalah yang muncul ketika pengurangan jam kerja tidak terlaksana dengan baik yaitu ketika seorang istri yang kembali sebagai pekerja *full-time*, namun suaminya juga harus bekerja selama 100 jam per minggu. Sementara itu, anaknya yang berada di tempat penitipan anak (*child care*) harus dijemput oleh orang tuanya. Pada akhirnya keadaan seperti itu tidak dapat menunjang kehidupan *work-life balance*, sehingga mempersulit perempuan untuk terjun kembali ke dunia kerja (Rich & Ueno, 2020).

Perlambatan pengimplementasian program-program tersebut dinilai oleh Kathy Matsui dalam (Parsons, 2020) menyatakan bahwa “*Abe mainstreamed the whole concept of gender diversity, shifting the context from human rights to economic growth*”. Artinya kelambatan pencapaian tersebut disebabkan karena konsep kebijakan yang dibuat tentang keseragaman gender pada proses pertumbuhan ekonomi tidak didahului dengan upaya untuk mengatasi hambatan yang sangat fundamental yaitu peran dan perilaku yang dibatasi oleh gender. Sehingga tekanan sosial menempatkan tenaga kerja perempuan ini hanya diperuntukkan untuk mencapai keinginan kebutuhan ekonomi dan dianggap sebagai sumber daya yang tidak berkelanjutan dan dapat disingkirkan. Hal tersebutlah yang menghalangi perempuan untuk mencapai perannya dalam kepemimpinan (Parsons, 2020). Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan

womenomics di Jepang masih jauh dari target keberhasilannya, hal ini disebabkan karena mayoritas pola pikir masyarakat Jepang mengenai peran perempuan belum mengalami perubahan. Sebagian besar pria di Jepang kurang setuju dengan ide yang memberikan kesempatan perempuan untuk bekerja dan mencapai posisi yang tinggi. Mereka menganggap bahwa keberagaman gender dalam dunia kerja hanya akan menciptakan kompetisi yang tinggi (Macnaughtan, 2015), sehingga mereka melakukan upaya untuk menyingkirkan perempuan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Setiawaty, menjelaskan bahwa *womenomics* menghasilkan dampak yang negatif dalam hubungan antara pekerja laki-laki dan perempuan. Dampak tersebut salah satunya yaitu menguatnya kembali isu '*matahara*' atau *maternity harassment* yaitu kekerasan psikis yang dilakukan pada wanita hamil atau wanita yang telah melahirkan yang masih berada di tempat ia bekerja (Setiawaty & Virgianita, 2019).

2.2 *Womenomics sebagai Gender Mainstreaming*

Ketimpangan gender dan isu '*comfort women*' membuat Jepang harus menghadapi tekanan internasional terus menerus dan berakibat pada reputasi Jepang. Diantara ketujuh negara maju lainnya seperti Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Inggris dan Amerika, Jepang berada pada tingkat kesetaraan gender paling rendah. Bahkan *The Global Gender Gap Report* mencatat keaktifan partisipasi perempuan di Jepang selalu menempati posisi terendah dari negara-negara berkembang. Disamping itu juga Jepang terus menerus mendapat kritik keras dari organisasi internasional seperti OECD dan PBB karena dinilai tertinggal dalam

kesetaraan gender dan diminta untuk segera mengatasi masalah tersebut (Hasunuma, 2017).

Untuk menyikapi kritik tersebut, Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang saat itu memilih untuk memperluas cakupan fungsi dari *womenomics*. Abe ingin menebus rekor dan memperbaiki citra Jepang dengan menunjukkan keterlibatan Jepang dalam kepemimpinan politik khususnya dalam *gender mainstreaming* secara internasional. Jepang meluncurkan berbagai rencana untuk menciptakan '*society in which women shine*' tidak hanya di Jepang tapi juga secara internasional. Kemudian pada sesi ke-68 Sidang Umum PBB, Abe memberikan pidatonya dengan memperkenalkan konsep *womenomics* yang akan memandu Jepang dengan melibatkan kekuatan perempuan (Official Website Perdana Menteri Jepang, 2013). Demikian juga untuk memulai niatnya tersebut, ia menyatakan empat kontribusi yang menjadi cita-cita Jepang agar dapat tetap menjadi anggota terkemuka dalam komunitas internasional. Adapun empat kontribusinya adalah sebagai berikut:

Pertama, sebagai bentuk penghargaan Jepang terhadap UN Women maka Jepang bermaksud untuk menjadi kontributor terkemuka sehingga dapat menjadi negara teladan. Jepang akan melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional terkait dengan UN Women. Kedua, Jepang bermaksud untuk mengembangkan *national action plan* mengenai perempuan, perdamaian, dan keamanan melalui kerjasama dengan orang-orang yang bekerja pada '*grass-roots level*' atau masyarakat sipil. Ketiga, kerjasama tidak hanya dilakukan dengan UN Women, namun juga Jepang akan bekerjasama dengan *International Criminal*

Court (ICC) untuk mencegah kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan dan akan memberikan bantuan baik secara material maupun bantuan psikologis kepada korban dari kejahatan seksual. Keempat, Jepang akan mengajukan kepada UN Commission tentang rancangan resolusi tentang status perempuan (Official Website Perdana Menteri Jepang, 2013).

Dilansir dari website Prime Minister of Japan and His Cabinet yang mengutip pidato Perdana Menteri Shinzo Abe, Abe juga memberikan contoh nyata tentang peran perempuan-perempuan yang berhasil dalam misinya. Mereka adalah Tokiko Sato⁴, Nilufa Yeasmin⁵, dan Islam Bibi⁶. Disamping itu Abe juga menjelaskan masalah-masalah yang telah mereka hadapi dan berjanji untuk memberikan bantuan dalam hal mengatasi masalah gender di negara-negara berkembang dan negara yang berkonflik (Official Website Perdana Menteri Jepang, 2013).

Adapun bantuan yang disebutkan ialah: 1) kontribusi berkelanjutan senilai US\$500 juta untuk menangani masalah kesehatan di kawasan Afrika dan memberikan pelatihan bagi 120.000 penyedia layanan kesehatan dan medis; 2) meningkatkan bantuan kepada perusahaan atau organisasi-organisasi kecil agar

⁴ Tokiko Sato adalah seorang ahli dari JICA (Japan International Cooperation Agency) yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan bayi yang baru lahir. Ia telah bekerja selama lebih dari 15 tahun di Yordania dalam misi memerangi penyakit HIV/AIDS melalui edukasi kepada perempuan untuk lebih menghargai kesehatan.

⁵ Nilufa Yeasmin adalah seorang ibu muda di Bangladesh yang berhasil memanfaatkan Poly-Glu Jepang sebagai bisnis dan memberdayakan perempuan disekitarnya untuk bergabung bisnisnya. Melalui bisnis tersebut akhirnya ia berhasil menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi.

⁶ Islam Bibi adalah ibu tiga anak dan sekaligus seorang polisi wanita dan pelatih perwira wanita muda di Afghanistan. Bibi yang bertugas menjaga tempat pemungutan suara untuk memantau pelatihan, namun akhirnya tewas ditembak dan dibunuh. Kisahnya menunjukkan perlindungan perempuan di bidang perdamaian dan keamanan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

dapat mewujudkan ide-ide mereka; 3) peluncuran bisnis rintisan (*start-up*) di Afrika dengan melibatkan peran perempuan; 4) dukungan perlindungan hak dan kesejahteraan fisik perempuan pada saat konflik terjadi melalui bantuan ODA sebanyak lebih dari US\$3 miliar; 5) menginisiasi program pendidikan anak perempuan secara internasional melalui kerjasama Jepang – AS yang mana perjanjian tersebut dilakukan pada pertemuan antara ibu negara AS yaitu Michelle Obama, Duta Besar AS untuk Jepang yaitu Caroline Kennedy, dan ibu negara Jepang yaitu Abe Akie pada tahun 2015 (Sekiguchi, 2015).

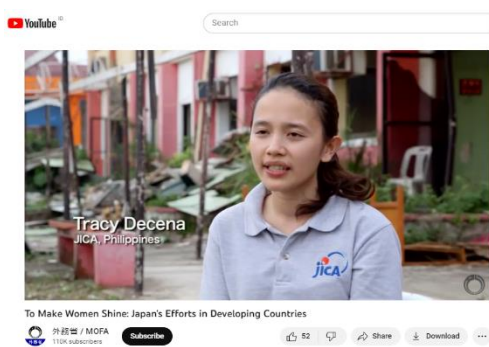


Gambar 2.1 Pertemuan Michelle Obama dan Abe Akie dalam Program Pendidikan Anak Perempuan

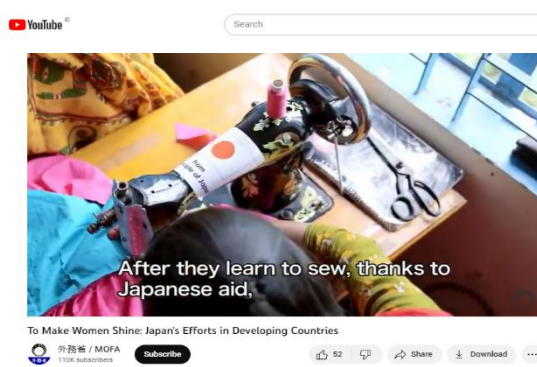
Sumber: VOA SouthEast Asia, (2015)

Pada tahun 2014, tim dari Shinzo Abe mengadakan konferensi WAW! (World Assembly for Women). Konferensi tersebut secara eksplisit dirancang untuk mensosialisasikan upaya dan kemajuan Jepang dalam strategi pertumbuhannya baik di dalam (domestik) maupun di luar Jepang. Dalam konferensi WAW! yang diadakan di Tokyo, Abe melaporkan bahwa sebanyak \$1,8 miliar dari \$3 miliar bantuan ODA telah diberikan untuk membantu pembangunan

sekolah bagi perempuan di Pakistan dan meningkatkan kontribusinya bagi UN Women lima kali lipat. Abe juga mengatakan bahwa UN Women akan membuka kantor di Jepang pada tahun berikutnya (Coleman, 2016). Sedangkan konferensi WAW! Selanjutnya diadakan tahun 2015 dengan mengangkat tema “WAW! For All” yang disertai dengan agenda progresif yang membahas tentang jam kerja Jepang yang panjang, *single-mothers*, dan posisi perempuan dalam pekerjaan yang tidak tetap, dan revisi pembagian kerja berdasarkan gender (Abe, 2015b).



Gambar 2. 2 Anggota JICA membantu perempuan di Filipina
 Sumber: Youtube MOFA (2015)
 (https://www.youtube.com/watch?v=J_fe1zioiOY)



Gambar 2. 3 Program bantuan Jepang kepada perempuan di Bangladesh
 Sumber: Youtube MOFA (2015)
 (https://www.youtube.com/watch?v=J_fe1zioiOY)

Kemudian upaya pemerintah Jepang selanjutnya dengan pemanfaatan media massa. MOFA atau Ministry of Foreign Affairs of Japan telah menggunakan *womenomics* sebagai bagian dari proses penerapan *gender mainstreaming* secara internasional Jepang melalui kampanye media massa. Kampanye dilakukan melalui iklan televisi CNN dari Maret-Mei 2015 dan ditayangkan di Amerika Utara, Asia, Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Upaya ini dilakukan MOFA untuk melawan propaganda anti Jepang yang semakin sengit (Yomiuri Shimbun, 2015). Selain melalui iklan di TV, konten MOFA mengenai *gender mainstreaming* juga tersedia pada laman Youtube kementerian. Konten-konten tersebut dibuat dengan berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan dan bantuan yang diberikan bagi perempuan yang berada di zona konflik. Salah satu video promosi MOFA pada tahun 2015 menampilkan pejabat JICA membantu perempuan di Filipina dalam bisnis pertanian, serta sebuah program bantuan Jepang kepada perempuan di Bangladesh yang belajar menjahit demi mencari nafkah. Setiap promosi dalam Youtube tersebut diakhiri dengan tagline '*Japan strives to create a world where women shine*'. MOFA menggunakan status Jepang sebagai negara industri maju yang mampu memberikan bantuan ODA untuk memajukan pemberdayaan perempuan dan dapat berperan sebagai pemimpin dalam pemberdayaan gender.

2.3 Latar Belakang Shinzo Abe

Shinzo Abe lahir pada tanggal 21 September 1954 di Tokyo, Jepang. Namun demikian selama beberapa generasi keluarganya berada di Nagato, Prefektur Yamaguchi. Shinzo Abe merupakan putra kedua dari Shintaro Abe dan Yoko Kishi. Ayahnya yaitu Shintaro Abe adalah seorang Menteri Luar Negeri Jepang terlama pasca perang sejak tahun 1982 hingga 1986 dan juga merupakan anggota terkemuka dari Partai Demokrat Liberal atau dikenal sebagai LDP (*Liberal Democratic Party*). Sedangkan ibunya, Yoko Kishi adalah putri dari Nobosuke Kishi, seorang Mantan Perdana Menteri Jepang (The Famous People, t.t.). Paman Abe yang bernama Eisuke Sato juga merupakan Perdana Menteri Jepang pada tahun 1964 hingga 1972 dan telah menerima Hadiah Nobel Perdamaian (CNN, 2021). Terlihat bahwa Abe terlahir dari keluarga politik baik paternal maupun maternal.

Semasa kecilnya, Abe dirawat dan dibesarkan oleh kakeknya Nobusuke Kishi semenjak ayah Abe selalu bekerja diluar rumah sebagai jurnalis dan kemudian menjadi politisi. Saat Shinzo Abe yang masih berusia lima tahun yang berada dipangkuan kakeknya, ketika terjadi pergolakan kekerasan dalam demonstrasi. Sejumlah kerumunan massa mengepung rumah Perdana Menteri Kishi di distrik Shibuya dan menolak akan revisi Perjanjian Keamanan AS dan Jepang. Pengalaman tersebut menjadi kenangan masa kecil yang melekat dalam pikiran Abe hingga saat ini (Pilling, 2006). Pada tahun 2006, Abe menuliskan sebuah buku untuk mempromosikan dirinya menjadi Perdana Menteri. Dalam bukunya "*Utsukushii kuni e (Towards a Beautiful Country)*", Abe menuliskan

kekagumannya terhadap kakeknya serta apa yang dilakukan kakeknya di masa lampau yang akhirnya membentuk pandangan politiknya (Edstrom, 2007).

Pendidikan Shinzo Abe dimulai dari sekolah dasar hingga tingkat universitas di Seikei Gakuen School System. Di Universitas Seikei, Abe belajar ilmu politik dan lulus pada tahun 1977. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikannya di USC Sol Price School of Public Policy di California Selatan untuk belajar kebijakan publik. Namun disana Abe hanya menjalani tiga semester lalu kembali ke Jepang pada awal tahun 1979.

Pada tahun yang sama, Abe memulai karirnya dengan bergabung dengan Kobe Steel. Di Kobe Steel, Abe hanya bekerja hingga tahun 1982 lalu akhirnya keluar dan kemudian bergabung dalam politik secara *full-timer* (Chambers, 2017). Ia kemudian menjadi asisten eksekutif Menteri Luar Negeri, yaitu posisi yang dipegang oleh ayahnya, Shintaro Abe. Selama Shinzo Abe bekerja dengan ayahnya, ia banyak belajar dan memperoleh wawasan serta pemahaman yang tajam mengenai cara kerja politik Jepang. Pada tahun 1991, ayahnya meninggal, untuk itu Shinzo Abe mengajukan dirinya untuk dapat menggantikan ayahnya. Kemudian pada Upper House Election tahun 1993, ia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Jepang dengan mengantongi jumlah suara yang tinggi (Hays, 2016). Setelah itu, Abe juga mengajukan dirinya sebagai calon LDP di Konsituensi ayahnya, Prefektur Yamaguchi (The Japan Times, 2006). Setelah itu, di tahun 1999 Abe menjadi direktur dari Komite Kesehatan dan Kesejahteraan, dan direktur Divisi Urusan Sosial di LDP (CNN, 2021). Di tahun 2001, ia diangkat oleh Perdana Menteri Mori Yoshiro menjadi wakil ketua sekretaris kabinet. Kabinet pertama Abe

dibentuk pada April 2001 yang mana saat itu Jepang berada dibawah pemerintahan Perdana Menteri Junichiro Koizumi. Selanjutnya di tahun 2003, Abe diberikan pekerjaan menjadi Sekretaris Jenderal LDP yang mana posisinya tersebut dapat memberikan banyak kesempatan baginya untuk mempromosikan diri dalam kekuasaan internal LDP. Tidak hanya menjalankan bisnis harian partai, posisi Abe secara substansial dapat memberikan pengaruh bagi kebijakan yang dibentuk pemerintah. Melihat kinerja Abe yang memuaskan, Koizumi kemudian memberikan jabatan kepala sekretaris kabinet bagi Abe pada tahun 2005 (Edstrom, 2007). Jabatan tersebut menaikkan posisi Abe yang semula berada di nomor kedua LDP menjadi nomor dua dalam pemerintahan. Selain itu, perubahan posisi tersebut mengindikasikan bahwa Abe adalah calon terkuat yang dapat menggantikan Koizumi nantinya. Pada tahun 2006 Koizumi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri Jepang dan Presiden LDP. Untuk menggantikan posisinya, pemilihan pun diadakan dan Abe pun terpilih sebagai presiden LDP pada 20 September 2006, sekaligus ia memenangkan jabatan Perdana Menteri pada 26 September 2006 yakni enam hari setelah pemilihan presiden LDP. Abe menjadi Perdana Menteri termuda pada periode pasca perang.

Pada masa jabatan Abe sebagai Perdana Menteri, ia mengajukan RUU yang bertujuan untuk mempromosikan rasa nasionalisme dan cinta negara dikalangan anak-anak. Selain itu, Abe juga menjaga hubungan yang baik dan meningkatkan kerjasama, khususnya dengan Amerika Serikat. Namun sayangnya pada pertengahan tahun 2007, Abe mengundurkan dirinya sebagai Perdana Menteri dengan alasan kesehatan, sesaat setelah pemerintahannya terlibat dalam skandal

keuangan. Setelah pengunduran dirinya, Abe menghabiskan waktunya di Diet⁷. Lalu Abe kemudian terpilih menjadi Perdana Menteri lagi pada 26 Desember 2012. Dibawah pimpinannya periode yang kedua, Abe mendirikan Dewan Keamanan Nasional Jepang dan membuat rencana ekspansi militer serta penyusunan rencana ekonomi dengan ambisius. Abe melanjutkan tujuan yang dimiliki oleh kakeknya, Kishi, yaitu meningkatkan kemampuan Jepang demi pertahanan diri. Namun prioritas Abe pada masa jabatannya yang kedua adalah memulihkan kembali perekonomian Jepang yang telah bermasalah (Kettler, 2020).

Sementara itu, kebijakan-kebijakan luar negeri yang dibentuk terlihat sangat strategis dan berwawasan internasional. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh yang sangat kuat dari ayahnya, Shintaro yang sempat menjabat sebagai menteri luar negeri yang terkenal dengan kerjasama internasionalnya. Berperan sebagai menteri luar negeri Jepang saat itu, Shintaro banyak menjalin hubungan dengan negara lainnya, termasuk dengan Amerika Serikat. Terlebih lagi, meningkatkan hubungan yang lebih erat dengan negara-negara Asia, tetangga Jepang. Mengikuti jejak ayahnya, Shinzo Abe mengejar tujuan yang sama yaitu melakukan perjalanan keliling dunia untuk melakukan kerjasama dan negosiasi, memberikan bantuan asing secara strategis, dan berusaha untuk memperbaiki masalah-masalah yang dihadapi dunia internasional. (Cai, 2017).

⁷ *Diet* atau Parlemen adalah badan legislatif pembuat undang-undang dari negara. Dalam sistem pemerintahan parlementer, rakyat tidak memilih presiden secara langsung, melainkan para anggota Diet memilih Perdana Menteri dari antara mereka sendiri.

Dibawah kepemimpinan Shinzo Abe, Jepang bertekad untuk berkontribusi lebih jauh lagi dalam mengatasi isu kesehatan global. Pada pertemuan KTT G7 tahun 2016, Jepang terpilih menjadi tuan rumah, bersamaan dengan Pertemuan Menteri Kesehatan G7 dan Konferensi Internasional Tokyo tentang Pembangunan Afrika. Pada pertemuan tersebut, Abe mendorong setiap pemimpin negara untuk mencapai kesepakatan untuk membuka kesempatan bagi mitra publik dan swasta dan masyarakat sipil untuk turut berpartisipasi dalam kesehatan global sebagai bentuk dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). Menanggapi isu wabah penyakit virus Ebola dan sindrom pernapasan yang terjadi di Timur Tengah, ia menegaskan bahwa masalah kesehatan bukan hanya semata-mata urusan domestik masing-masing negara. Sehingga upaya mendasar yang dapat dilakukan adalah para pemimpin harus berjuang untuk bersatu daripada terpecah-belah, dan meningkatkan keamanan dan perdamaian manusia melalui kesehatan yang merata (Abe, 2015b).

Melanjutkan kebijakan pemimpin sebelumnya terkait jaminan kesehatan, Abe memasukkan kebijakan terkait kesehatan ke dalam agenda nasionalisnya yang dikenal dengan *'healthy' nationalism* (Hein, 2015). Dalam pidatonya tersebut ia menyebutkan bahwa dalam 70 tahun terakhir, tingkat harapan hidup di Jepang terus meningkat dan konsisten menduduki peringkat teratas. Pencapaian tersebut adalah hasil dari penetapan jaminan kesehatan semesta pada tahun 1961. Pola makan yang sehat, akses air yang bersih, serta akses perawatan kesehatan yang merata menghasilkan masyarakat Jepang yang sehat (Abe, 2015b).